



Hamka¹
 Ikhlas UI Aqmal²
 Hendra Pratama Danial³

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKEP

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan pertahun di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan teknik analisis data berupa metode efektivitas yang bersumber dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Pada Tahun 2014 sebesar 93%, tahun 2015 sebesar 103%, tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 108%, dan tahun 2018 sebesar 106% dengan rata-rata efektivitasnya sebesar 100,8% pertahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pelabuhan di kabupaten pangkep selama tahun 2014 sampai 2018 sangat efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%.

Kata Kunci: Retribusi, Efektivitas, Pelabuhan

Abstract

This research is a descriptive study using the effectiveness ratio which aims to determine the effectiveness of the annual contribution of Port Levy Collection at the District Transportation Service Pangkep. The data collection technique used is documentation. The type of data collected is quantitative data with data analysis techniques in the form of effectiveness methods sourced from primary data. Based on the research results, it can be concluded that the level of effectiveness of Port Levy collection at the Pangkep Regency Transportation Service in 2014 was 93%, in 2015 was 103%, in 2016 was 94%, in 2017 was 108%, and in 2018 was 106% on average. -The average effectiveness is 100.8% per year. Thus, the collection of port levies in Pangkep Regency during 2014 to 2018 was very effective, because the average effectiveness was above 100%.

Keywords: Retribution, Effectiveness, Port

PENDAHULUAN

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001 maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga memerlukan sumber penerimaan yang diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Penerimaan daerah berasal dari dalam wilayah sendiri yang menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar adalah pendapatan asli daerah, yang dimana pemerintah daerah menjadikan tolak ukur dalam meningkatkan kemandirian pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain yang sah. Salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang diperoleh atau dipungut dan berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diwilayahnya sendiri. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah pemerintah mengakibatkan adanya pemungutan retribusi daerah dengan berbagai jenis yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha dalam rangka pelaksanaan

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
 email: ikhlasaqmal@ung.ac.id

pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah dalam mengatur tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam peraturan daerah dan pengelolaan kepelabuhanan.

Pengelolaan kepelabuhanan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan pengaturan teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis yang khususnya mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan).

Retribusi pelabuhan merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat pangkep mengakibatkan peningkatan jumlah kapal. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kapal yang menggunakan area parkir disekitar dermaga atau pelabuhan serta meningkatkan efektivitas dalam pemungutan retribusi pelabuhan.

Efektivitas adalah bagaimana suatu ukuran tentang hasil akhir yang telah ditentukan terapai pada suatu target dan sasaran. Hasil akhir adalah tujuan utama pemungutan retribusi semakin mencapai target yang telah ditentukan maka efektivitasnya semakin baik. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kota Pangkep berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi. Dimana pemungutannya membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi kapal yang besarnya di tetapkan dalam peraturan daerah.

Pemberlakuan pemungutan retribusi serta dengan adanya peningkatan jumlah kapal yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan atau pemasukan pemerintah Kota Pangkep dari pos penerimaan retribusi pelabuhan. Berbagai alternatif sumber penerimaan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang mungkin dipungut oleh undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikembangkan dalam daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang membantu melaksanakan otonominya dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi dan bantuan. Sumber retribusi daerah juga diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator pemerintah daerah dalam menyusun otonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara konseptual dan diharapkan juga memiliki kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab. Kemampuan yang nyata itu diharapkan bersumber dari kemampuan pemungutan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan secara fiskal harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan dalam sumber-sumber keuangan daerahnya yang berasal dari retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah dalam berbagai aspek. Objek-objek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah kabupaten pangkep yaitu retribusi jasa umum.

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang wilayahnya cukup luas dan terdiri atas Tiga Dimensi perwilayahan yaitu daratan, kepulauan dan pegunungan. Dimensi ruang tersebut sangat mewarnai kehidupan penduduknya dengan proresi yang beraneka ragam seperti petani, nelayan, pegawai, pekerja tambang, pedagang dan kegiatan jasa lainnya. Wilayah yang sangat luas sekitar 1.112,29 km² yang terdiri atas kota, daerah, daratan dan pulau-pulau yang cukup jauh letaknya mengakibatkan peranan jasa perhubungan utamanya subsektor perhubungan laut yang sangat penting untuk memobilisasi penduduk khususnya yang bertempat di pulau-pulau.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan satastatik nonparametris. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan, penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis dan grafik batang, piechart (diagram lingkaran), dan pictogram (Sugiyono, 2011).

Lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep yakni pada instansi terkait yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah dan data pendukung antara lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep, Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep dan BPS Kabupaten Pangkep. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung serta wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data laporan keuangan, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek.

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu: penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan alat analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan rasio keuangan:

Rasio efektifitas keuangan daerah adalah rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas (Halim, 2002) yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas sebagai berikut: 1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif; 2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif; 3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif; 4. Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif; dan 5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep sebagai obyek penelitian dengan memilih sampel sebanyak 5 (lima) tahun data retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah berupa Laporan Retribusi Pelabuhan, data tersebut akan dianalisis guna melihat tingkat efektivitas baik atau tidak. Oleh karena itu, maka dapat digambarkan perkembangan hasil peroleh retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Retribusi Pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Pelabuhan (Dalam jutaan rupiah)	Perubahan (%)
2014	Rp. 21.490.500	-
2015	Rp. 24.130.000	0,12
2016	Rp. 22.400.250	-0,07
2017	Rp. 26.002.500	0,16
2018	Rp. 25.965.000	-0,01

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perkembangan hasil Retribusi Pelabuhan di Kabupaten Pangkep mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebanyak Rp.21.490.500 dan tahun 2015 sebanyak Rp 24.130.000 atau meningkat sebesar 0,12% dan pada tahun 2016 sebanyak Rp.22.400.250 atau terjadi penurunan sebesar -0,07% dan pada tahun 2017 sebanyak Rp.26.002.500 atau meningkat sebesar 0,16% dan pada tahun 2018 kembali pendapatan retribusi menurun Rp.25.965.000 atau sebesar -,01%. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas lalu

lintas dipelabuhan tidak menentu, salah satu faktornya adalah pengaruh cuaca sehingga operasional pelabuhan tidak maksimal sehingga berdampak pada hasil retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep mengalami fluktuasi.

Analisis Efektivitas

1. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{21.490.500}{22.915.000} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2014 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{21.490.500}{22.915.000} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2015 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{21.490.500}{22.915.000} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2016 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{21.490.500}{22.915.000} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2017 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg

dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Rasio efektivitas pelabuhan tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{21.490.500}{22.915.000} \times 100\% \\ &= 93\% \end{aligned}$$

Efektifitas pemungutan retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep tahun 2018 dapat dikatakan efektif karena persentase efektivitasnya sebesar 93% berkisar antara 90-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yang mana ditetapkan target sebesar Rp22.915.000,00 akan tetapi realisasi yg dicapai hanya Rp21.490.500,00. Ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan retribusi Pelabuhan Kabupaten Pangkep masih kurang sebesar Rp1.424.500,00 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh tingkat efektivitas antara target penerimaan retribusi dan realisasi retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Secara jelas efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Kabupaten Pangkep ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelabuhan di Kabupaten Pangkep Tahun 2014-2018

Tahun	Penerimaan retribusi pelabuhan (Rp)	Target penerimaan retribusi pelabuhan (Rp)	Efektivitas (%)
2014	Rp.21.490.500	Rp.22.915.000	93
2015	Rp.24.130.000	Rp.23.350.000	103
2016	Rp.22.400.250	Rp.23.650.000	94
2017	Rp.26.002.500	Rp.24.000.000	108
2018	Rp.25.965.000	Rp.24.515.000	106
Rata rata			100,8

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat digambarkan tingkat efektivitas hasil retribusi di Pelabuhan Kabupaten Pangkep yaitu: Pemungutan retribusi pelabuhan di Kabupaten Pangkep selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara keseluruhan dikatakan efektif yaitu berkisar antara 93% dan sangat efektif sampai 108% dengan rata-rata efektivitasnya 100,8%, atau lebih dari 100% yang berarti pemungutan retribusi Pelabuhan di Kabupaten Pangkep dapat dikatakan “sangat efektif”. Pada Tahun 2014 realisasi retribusi tidak mencapai target penerimaan retribusi dikarenakan masih adanya pemilik kapal yang tidak disiplin dalam membayar retribusi parkir kapal, hal ini juga dikarenakan tingkat pengawasan yang kurang baik, Sedangkan tingkat efektivitas retribusi pelabuhan pada tahun 2014 dikatakan “efektif”. Pada Tahun 2015 realisasi retribusi meningkat sebesar 0,12% ini artinya bahwa realisasi tersebut melebihi target retribusi maka tingkat efektivitas sebesar 103%, maka dinyatakan “sangat efektif”.

Salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan dari pada target di Pelabuhan Pangkep itu karena ditahun tersebut jumlah kapal yang parkir berbobot besar meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnyapada tahun 2016 realisasi retribusi pelabuhankembali turunsebesar 0,07% dari target retribusi yang direncanakan sehingga tingkat efektivitas retribusi pelabuhan pada tahun 2016 dalam posisi efektif. Salah satu faktor terjadinya penurunan penerimaan diakibatkan karena jumlah kapal yang parkir menurun dikarenakan lalu lintas kapal dipengaruhi oleh cuaca yang kurang bersahabat ditahun tersebut, faktor lain yaitu menurunnya kunjungan masyarakat pulau kekota untuk berbelanja yang selalu menggunakan jasa kapal Kemudian pada tahun 2017 realisasi retribusi pelabuhan mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari target retribusi yang direncanakan, maka tingkat efektivitas retribusi

pelabuhan pada tahun 2017 dikatakan “sangat efektif”. Salah satu faktor tingkat efektivitasnya tinggi karena adanya perbaikan di internal Dinas Perhubungan dalam hal ini pengelolaan keempat dermaga Kabupaten Pangkep yang semakin baik, dapat dilihat dari pengawasan yang diperketat dan struktur manajemen diperbaiki, Sehingga penerimaan retribusi tepat sasaran, faktor lain yaitu meningkatnya jasa kapal menuju daerah kepulauan terluar pangkep untuk mengangkut logistik.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Wibowati (2010) menggambarkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah dari faktor pedagang yang kurang disiplin dan tidak tepat waktu dalam membayar retribusi pasar. Sedangkan tahun 2018 realisasi retribusi pelabuhan melebihi dari target retribusi yang direncanakan, namun penerimaan ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu selisih 0,01%. Ada dua faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan ini dikarenakan adanya beberapa kapal yang aktivitasnya berkurang yang dimana kapal tersebut masuk dalam masa perawatan dan perbaikan sehingga aktivitas dipelabuhan berkurang, dengan berkurangnya aktivitas kapal tersebut berdampak pada turunnya penerimaan retribusi parkir kapal sebesar 0,01 % dari tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini dikatakan efektif ditahun 2014 dan 2016 sedangkan 2015, 2017 dan 2018 sangat efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelabuhan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep pada tahun 2014 dan 2016 dalam posisi efektif sedangkan tahun 2015, 2017, dan 2018 dalam posisi sangat efektif. Pemerintah daerah agar menetapkan standar efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga pemerintah daerah kabupaten Pangkep dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelabuhan untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdussamad, S. N., Abdussamad, Z., Reza, W., & Aqmal, I. U. (2024). Implementation of Path Analysis for Modeling the Influence of Organizational Culture on Work Productivity. *Jurnal Pijar Mipa*, 19(4), 710-714.
- Agustina, Oesi. (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Aryo Sudibyo Yudha, Sun Jianfu, Icut Rangga Bawono. (2014). *Teori Institusi dan Korupsi: Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Public di Cina dan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII. Lombok: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Handoko, Hani. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta : BPF.
- Heru Atik. (2005). *Penyusunan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja, Modul Pelatihan, PMPK*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hony Adhiantoko. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/17846/1/Skripsi%20.pdf>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU. RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. (2003). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kus Endang Muji Rahayu. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 – 2012. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/30372/12/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Lawrence J. Gitman. (2003). Principles of Managerial Finance. United State: Pearson Education Inc.
- Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 236-242.
- Munawir S. (2007). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Munir Dasrul, Juanda Arsy, Nogi, S. Tangkilisan, 2004, Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah, YPAPI, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 Tentang Maksud Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pasal 13 huruf a.
- PSAK No. 1 (Revisi 2009) Komponen Laporan Keuangan Lengkap, Penyajian Laporan Keuangan, dan Extraordinary Items.
- Siahaan, P. Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sidiki, Y. A. E. R., Blongkod, H., & Aqmal, I. U. (2024). Pengaruh Perencanaan Strategik Dan Pemberian Informasi Biaya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Journal of Accounting, Economics, and Business Education, 2(1), 78-92.
- Soemarso S. R. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research and Development. Bandung: Alfabeta
- Yeremias T Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanti Irawati. 2008. Auditing. Bandung: Gramedia Pustaka